

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menjamurnya lembaga filantropi di Indonesia dewasa ini mengakibatkan pentingnya nilai-nilai akuntabilitas dalam pengelolaan sehingga membuat lembaga filantropi berlomba-lomba dalam berbenah. Salah satu hal penting adalah bagaimana sebuah lembaga filantropi dapat mengelola lembaganya dengan berlandaskan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, mengingat begitu banyak permasalahan seperti tindakan penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan. Dalam lembaga filantropi, akuntabilitas sangat penting karena sebagai citra dan tanda kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga untuk mendapatkan donasi-donasi sehingga diperlukannya pelaporan yang kredibel. Salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dengan berpacu pada PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang telah disepakati oleh rapat komite standar akuntansi keuangan.

Indonesia patut berbangga karena menempati posisi puncak negara yang tingkat kedermawanannya tinggi. Menurut *Charities Aid Foundation (CAF) world giving index* pada tahun 2017 hingga 2019, Indonesia selalu menempati 3 besar dunia di atas Australia dan Selandia Baru dengan jабaran skor sebagai berikut; untuk membantu orang lain sebesar 46 persen, keinginan berdonasi 78 persen, dan melakukan kegiatan relawan 53 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas filantropi di Indonesia sangat tumbuh pesat. Dana filantropi disalurkan diberbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, salah satunya adalah pendidikan dan dakwah. Banyaknya dana filantropi dari berbagai yayasan amal untuk disalurkan menjadi tantangan tersendiri bagi penerima dana khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana. Tujuan dari akuntansi pada sektor *non-profit* sebagai alat informasi pimpinan organisasi atau bagian keuangan organisasi dalam melaporkan tanggungjawab pengelolaan secara tepat dan efektif kepada publik dan Lembaga penyalur dana filantropi.

Pelaksanaan tata kelola pada organisasi yang berorientasi *profit* akan mengedepankan tata kelola yang berfokus pada baiknya administrasi sehingga laporan keuangan sangatlah penting sedangkan pada sektor *non profit* pelaksanaan tata kelola berorientasi berdasarkan harapan masyarakat yang berderma untuk mendapatkan pahala sehingga penerima dana mengelola untuk kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, dakwah, dan tarbiyah pengurusan jenazah, menyantuni fakir miskin, dll. Oleh karena itu, tolok ukur dari akuntabilitas pada organisasi keagamaan adalah pelayanan.

Organisasi tidak dapat dipisahkan dari nilai yang dibangun atas dasar nilai-nilai budayanya khususnya akuntabilitas organisasi. Di Indonesia terdapat begitu banyak budaya sehingga nilai-nilai luhur yang dahulu dipraktikkan tanpa adanya sentuhan budaya luar menjadi ciri khas dalam pengelolaan organisasi masyarakat dan kepemimpinan sehingga menciptakan akuntabilitas tata kelola yang berlandaskan kejujuran (Renda, 2015). Akuntabilitas dalam konteks syari'ah yang diharapkan dalam pengelolaan dana filantropi Islam bukan hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tetapi harus disempurnakan dengan

*tazkiyah* (penyucian hati). Tazkiyah dapat dikatakan sebagai proses yang mendorong individu untuk menjadi lebih baik melalui penyucian hati secara berkelanjutan (Mulawarman, 2011: 02). Seperti halnya dalam pengelolaan dana masjid, akuntabilitas masjid dalam pengelolaan dana jamaahnya adalah kejujuran dan keadilan yang merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh pengurus masjid untuk mewujudkan *habbul min annas* dan *habbul min Allah* (Siskawati, dkk, 2016).

Penelitian Patty dan Irianto (2013) menjelaskan bahwa makna akuntabilitas pada organisasi gereja berkaitan dengan penghimpunan dana yang biasa disebut “perpuluhan” yang berarti perpuluhan sebagai milik Tuhan, tanda pengakuan, kasih, kemurahan, iman, kepercayaan, tanggung jawab diri, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjelaskan bahwa dasar setiap organisasi dalam memaknai akuntabilitas berbeda dari segi konsep dan kata akan tetapi mengarah pada satu tujuan akuntabilitas utama yaitu kejujuran kepada Tuhan, sebagaimana pada firman Allah pada surah (An Nisa, 4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil.” (QS. An-Nisa, 4:58)

Selain itu, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kebiasaan masyarakat disuatu tempat karena cara didik, nilai, kebiasaan yang pertama kali

didapatkan dari orang tua adalah nilai-nilai luhur. Setiap daerah memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokalnya seperti variasi dari budaya dan adat, suku-suku bahkan agama, yang menjadikan daerah tersebut memiliki keunikan dari nilai etika dan nilai religi. Salah satu penelitian yang membahas tentang penerapan budaya lokal terhadap akuntabilitas telah dilakukan oleh Zulfikar (2008) yang menjelaskan korelasi antara nilai kearifan budaya Jawa terhadap akuntabilitas sehingga mendapatkan konsep *obah-mamak-sanak* yang berisikan tentang konsep dasar dalam menyusun arus kas nilai tambah-neraca. Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Randa dan Daremos (2014) yaitu menggabungkan nilai budaya lokal tana toraja.

Indonesia memiliki begitu banyak budaya di setiap daerahnya, salah satunya nilai *budaya siri' na pacce* yang merupakan prinsip dan pedoman hidup yang digunakan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Dengan memahami bentuk akuntabilitas, maka penting menggabungkan praktik akuntabilitas dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal (Darwis dan Dilo: 2012), sehingga penelitian mengenai akuntabilitas yang berbasis kearifan budaya lokal terhadap pengelolaan dana filantropi seperti *siri' na pacce* perlu dilakukan karena pengelolaan akuntabilitas secara konvensional hanya menekankan pada aspek manajerial meskipun penekanan pada akuntabilitas tetap sama yaitu pada aspek kinerja.

Akuntabilitas tentu menjadi hal penting bagi berkembangnya sebuah organisasi non profit. Banyaknya kasus penyelewengan dana filantropi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penggalangan

dana bodong yang meminta dana donasi untuk disalurkan ke orang yang membutuhkan padahal kenyataannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tentu kita masih ingat kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Cak Budi yang menggalang dana untuk orang kurang mampu, dilansir pada laman BBC bahwa uang tersebut yang seharusnya disalurkan justru digunakan untuk membeli kendaraan fortuner senilai 1,7 milyar dengan dalih sebagai operasional. Hal ini terjadi karena pengelolaan yang kurang baik, rendahnya akuntabilitas dari segi pelaksanaan dan pelaporan membuat masyarakat resah, akibatnya kritikan terlontar di sosial medianya. Efek dari permasalahan tersebut, membuat Cak Budi menjual kembali fortuner untuk disalurkan ke orang yang membutuhkan atau sesuai dengan program yang telah disusunnya. Akibat dari masalah tersebut membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena adanya kasus penyelewengan.

Kasus selanjutnya di tahun 2020 ancaman yang diberlakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Makassar yaitu hukuman mati bagi penyelewengan dana bantuan sosial, dilansir pada IDN Times Sulsel menyatakan bahwa terdapat penyelewengan dana bantuan sosial yang terjadi sehingga pemkot mengancam masyarakat yang melakukan tindakan korupsi dengan hukuman mati, senada dengan yang dilansir pada kabar.news menyatakan bahwa bertambahnya kasus penyelewengan dana sosial karena kurangnya pengawasan dari segi pencatatan nama penerima bantuan, selain itu adanya respon dari masyarakat karena kurang akuntabelnya sehingga terjadi kericuhan dan protes yang dilakukan oleh sebagian

masyarakat makassar sehingga menjadi stimulus untuk diusutnya kasus penyelewengan ini. Hal ini didasari oleh kebiasaan dan budaya masyarakat Sulawesi khususnya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar yang menganggap penyelewengan dan kurang akuntabel sebagai sifat yang melanggar nilai budaya *siri' na pacce*.

Selain itu, terdapat kasus pembunuhan di kabupaten Bantaeng yang didasari oleh budaya lokal yaitu *siri' na pacce* dilansir pada tagar.id yang menyatakan bahwa motif dari pembunuhan tersebut didasari oleh *siri'* atau rasa malu atau harga diri, meskipun penerjemahan *siri'* dalam kasus ini kurang tepat, akan tetapi pengaruh yang dihasilkan sangat berperan dan berefek. Adat-istiadat Sulawesi Selatan memang dikenal masih kental sehingga nilai-nilai luhur ini masih diterapkan di zaman modern. Konsep *siri'* mengarah kepada harga diri, setiap orang harus memiliki rasa malu dalam bertindak sebagaimana ungkapan di kalangan Bugis;

*“utettong ri ade'e najagainnami siri'ku”*

Artinya; “saya taat kepada adat demi terpeliharanya harga diri saya”

Menurut Mattulada (1985:108) bahwa hal yang mendorong seseorang patuh karena adanya *siri* yang elemen-elemennya dibangun dari perasaan yang halus, emosi, dan hal yang berkaitan. Berangkat dari sinilah tafsiran dari makna *siri'* seperti rasa malu, hina atau 'aib, dan harga diri atau sebuah kehormatan. Pentingnya nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai kontrol dalam bertindak. Laplanche dan Pontalis (1973: 435) menjelaskan bahwa pentingnya budaya atau adat sebagai super ego dalam bertindak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan

nilai budaya *siri' na pacce* dan tata kelola suatu organisasi atau Lembaga, dapat dikatakan bahwa sangat penting karena budaya sebagai pengontrol dalam bertindak dan bekerja. Selain itu, efek jera yang ditimbulkan lebih besar daripada akuntabilitas konvensional karena adanya sangkut paut budaya dan masyarakat.

Rumah Qur'an Al Fatih merupakan program kerjasama antara Yayasan Fathan Mubina Jayakarta sebagai eksekutor dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai penyalur dana dengan konsep rumah Pendidikan dan dakwah bagi anak yatim dan fakir miskin. Fokus rumah Qur'an ini adalah mendidik dan mengajarkan al Qur'an bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal unik pada rumah Qur'an ini adalah sebagian besar dari staff Lembaga tersebut berasal dari Sulawesi yang masih kental nilai budayanya seperti Bahasa yang digunakan adalah perpaduan Bahasa lokal dan Bahasa Indonesia dan kebiasaan daerah setempat sehingga sangat memengaruhi gaya bekerja dalam mengembangkan program tersebut. Terdapat beberapa program kerja dan anggaran yang dialokasikan berdasarkan proposal yang dituliskan setiap 2 semester atau 1 tahun sekali. Program tersebut dirumuskan dalam rapat terbatas yang kemudian diserahkan kepada bendahara untuk menganggarkan.

Berangkat dari permasalahan yang dijelaskan pada paragraf- paragraf sebelumnya, tingginya resiko penyelewengan dan kesalahan dalam laporan khususnya laporan keuangan, membuat penelitian ini penting karena menggabungkan antara akuntabilitas konvensional dengan nilai- nilai budaya *siri' na pacce* sebagai nilai luhur pengontrol dalam bertindak. Melihat dari kondisi di lapangan, terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia di Rumah Qur'an Al

Fatih, khususnya bagian keuangan yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan dibidang akuntansi atau pelatihan khusus mengakibatkan tertolaknya laporan keuangan tahunan pada tahun ajaran 2017-2018 sehingga memerlukan beberapa kali revisi.

Masalah ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas dari segi pelaporan keuangan sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan YBM PLN. Padahal harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Selain itu, kurang terstrukturnya pengelolaan staff dalam menjalankan program kerjanya. Bahkan belum adanya kurikulum yang pasti dan tolok ukur keberhasilan setiap program.

Dalam menjalankan program, staff bekerja karena faktor kewajiban bukan karena passion atau semangat dari dalam diri, padahal untuk mendapatkan output yang baik, seharusnya staff tersebut memiliki kesadaran, inisiatif, dan motivasi untuk mengajar dan menjalankan program. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa pentingnya sinergi antara nilai agama dan nilai budaya *siri' na pacce* diterapkan dalam diri untuk menambah semangat dalam menjalankan program agar terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana maupun pelaksanaan. dalam Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“AKUNTABILITAS BERBASIS NILAI BUDAYA LOKAL *SIRI' NA PACCE* DALAM PENGELOLAAN FILANTROPI ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Meninjau latar belakang di atas bahwa akuntabilitas suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/stakeholder dalam mengelola



dana filantropi. Penelitian ini berusaha melihat nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang dijadikan prinsip dan pegangan hidup masyarakat makassar, sehingga dapat kita rumuskan bahwa masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana filantropi di Rumah Qur'an Al Fatih Yayasan Baitul Maal PLN, Jakarta timur?
- b. Bagaimana penerapan nilai *siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan filantropi di Rumah Qur'an Al Fatih Yayasan Baitul Maal PLN, Jakarta timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut;

- a. Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana filantropi Islam di Rumah Qur'an Al Fatih YBM PLN.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi nilai budaya *lokal siri' na pacce* dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian untuk memberikan manfaat sebagai berikut;

- a. Manfaat Praktis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi staff-staff khususnya divisi keuangan dan bendahara Rumah

Qur'an al Fatih agar lebih transparan dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dana. Selain itu, dalam pelaksanaan tata kelola dana pentingnya kejujuran karena dana yang didapatkan berasal dari umat Islam dalam bentuk ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) yang merupakan amanah dari donatur-donatur yang berharap dana yang disumbangkan digunakan dalam kebaikan agar mendapatkan amal jariyah. Nilai kejujuran adalah suatu pernyataan berdasarkan fakta sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi suksesnya seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2007) bahwa akuntabilitas sebagai pemegang amanah dalam menyajikan informasi pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab penerima dana.

- b) Sebagai bahan referensi masyarakat umum untuk lebih mengetahui akuntabilitas berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan pada pengelolaan dana filantropi Islam.

b. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana berbasis budaya lokal bagi masyarakat khususnya pemerhati filantropi

- b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan hasil penelitian atau menjadi referensi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana filantropi berbasis budaya lokal

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis berusaha membagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab dan diuraikan menjadi beberapa sub bab agar lebih mudah dalam pembahasan.

BAB I adalah bagian pendahuluan yang berisi tentang uraian argumentasi mengenai pentingnya akuntabilitas berbasis budaya lokal dalam mengelola dana filantropi. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori yang berisi tentang penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan akuntabilitas yang berfungsi sebagai acuan dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian yang berisi tentang penjelasan metode yang akan dilakukan dalam menjawab latar belakang akuntabilitas pengelolaan dana filantropi. Uraian ini berisikan jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, lokasi/tempat, Teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, Teknik keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang menjelaskan hasil dari penelitian di Rumah Qur'an Al Fatih. Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana

implementasi budaya lokal pada pengelolaan dana filantropi di Rumah Qur'an Al Fatih.

BAB V berisikan kesimpulan dan saran. Penulis menuliskan poin penting dari penelitian akuntabilitas pengelolaan dana dan memberikan saran-saran yang dianggap penting. Bab ini merupakan bagian penutup.

jawab kepada Ida Sang Hyang Widhi Yasa sebagai pemilik dana umat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 45 yang mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba agar laporan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Hal ini dianggap wajar karena komunitas yang cenderung kecil dan pengelolaan yang cakupannya terbatas.

2. Asbi Amin (2019), ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika *Siri'na Pacce*: Persepsi Mahasiswa Akuntansi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena kasus kecurangan dalam praktek akuntansi dan penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan yang menunjukkan luntunya budaya timur. Dengan adanya penerapan budaya timur seperti *siri'na pacce* diharapkan dapat mencerminkan praktek etika dalam akuntansi yang mengedepankan prinsip kebenaran dan kejujuran.

Hasil penelitian adalah beberapa mahasiswa memahami bahwa etika *siri'na pacce* dalam praktek akuntansi yaitu rasa malu, harga diri, kejujuran dalam bertingkah laku dan norma yang berlaku. Apabila seorang akuntan menerapkan *siri'na pacce* dalam pekerjaannya maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan dalam penyusunan akan berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

3. Sri Rahayu, dkk (2018), IRAJ: International Journal of Management and Applied Sciences Volume-4, Issue-7 with the title “*Siri’ na pacce* culture of Bugis-Makassar in the Context of Modern Life (Overview Historically and Theory Jean Baudrillard Simulation”. Penelitian ini menjelaskan tentang makna secara filosofi budaya lokal *siri’ na pacce* serta pengimplementasiannya di masyarakat modern saat ini. Bagaimana eksistensi nilai budaya *siri’ na pacce* masih diterapkan dengan mempertahankan nilainya sehingga menjawab tantangan perubahan
4. Ultsani, Fadillah, dkk. (2019). Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. Vol. 9, No. 2 dengan judul “Menggali Nilai *Siri’ Na Pacce* Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi”.

Penelitian ini memiliki tujuan mencari tahu apakah ada hubungan nilai *siri’ na pacce* dengan tindakan anti korupsi, sehingga untuk menjawab permasalahan ini maka dilakukan penelitian yang berbentuk penelitian normative deskriptif dengan mengumpulkan data-data seperti data primer berbentuk bahan hukum, hasil wawancara, dll. Hasil penelitian ini adalah budaya *siri’ na pacce* mengandung dimensi-dimensi yang sangat berhubungan erat dengan tindakan anti korupsi.
5. Fuady, Muhammad Ikram. (2019). FIAT JUSTISIA Faculty of Law, Lampung University. Vol. 13 No. 3 with the title *Siri’ Na*

*Pacce* Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Siri 'Na Pacce* sebagai hukum tidak tertulis dan hukum positif Indonesia karena hukum tertulis memiliki posisi yang sama di Republik Indonesia yang dapat dilaksanakan selama tidak ada perbandingan dalam KUHP sebagai KUHP; Dalam putusannya, hakim telah progresif dengan menjatuhkan sanksi yang lebih rendah dari permintaan jaksa yang mengindikasikan bahwa hakim mengakui *Siri 'na Pacce* meskipun tidak memasukkannya secara tertulis dengan pertimbangan poin-poin hakim; Berat dan ringannya hukuman dan nilai-nilai *Siri 'na Pacce* yang dipegang oleh hakim tergantung pada manfaat dan perasaan yang dipegang oleh hakim sebagai tolok ukur berdasarkan kepribadian hakim individu; Hakim mengakui budaya *Siri 'Na Pacce* sebagai hukum yang hidup tetapi belum dapat menerapkannya sebagai penilaian atas alasan pembenaran, pengampunan, dan mitigasi; Oleh karena itu, *Siri 'Na Pacce* ini harus dijaga sebagai identitas Indonesia.

6. Pitoyo, Djoko. (2008). Jurnal Filsafat: Universitas Gadjadara Vol. 18, No. 2 dengan judul “Tuna Satak Bathi Sanak” (Kearifan Jawa dalam Etika Bisnis)

Penelitian ini menjelaskan tentang etika bisnis yang berlandaskan nilai kearifan lokal. Nilai budaya yang diangkat adalah

kearifan jawa “tuna satak bathi sanak” yang berarti berkorban sedikit, tetapi mendapat banyak relasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari pustaka kejawaaan kemudian dianalisis dengan menggunakan formulasi.

Hasil data tersebut dikaitkan dengan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari penelitian ini yaitu kearifan jawa dapat berkontribusi sebagai landasan moral bagi kegiatan bisnis dari aspek manajerial maupun tanggungjawab sosial atau CSR (Corporate Sosial Responsibility). Peneliti merekomendasikan perlunya reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal tersebut dalam dunia bisnis agar pebisnis dapat mengimplementasikannya sehingga menjadi kesadaran moral.

7. Marlia Asamarani dan Rohmawati Kusumaningtias. (2019). AKUNESA: Jurnal akuntansi Unesa, Vol. 8, No. 1 dengan judul “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Prespektif *Maqashid Syariah*: Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas yayasan dana sosial menggunakan prespektif maqashid Syariah. Penelitian memasukkan nilai-nilai Islam seperti ibadah, ihsan, amanah kedalam proses pertanggungjawaban yayasan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma intrepretif fenomenologi dengan memahami realitas



sosial sebagai realitas subjektif sehingga terbuka tentang kehidupan sosial. Hasil dari penelitian ini adanya korelasi antara wujud akuntabilitas keuangan dengan menggunakan pedoman PSAK 109, UU No 11 tahun 2011 dengan surat Al Baqarah: 282 dan maqashid Syariah.

8. Athifah, Ai Nur Bayinah, Efri Syamsul Bahri. (2018). PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara”

Penelitian ini meneliti tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi public terkait masalah laporan keuangan. Peneliti berusaha untuk menyajikan pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan donatur di Yayasan PPA Daarul Qur’an. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis statistic regresi berganda yang hasilnya menerangkan bahwa adapnya pengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan donatur. Dari 100% faktor yang mempengaruhi kepercayaan donatur, variabel akuntabilitas publik dan transparansi terhitung memiliki pengaruh hanya sebesar 14,6%. Sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

9. Ibna Kamilia dan Pujiarti. (2017). JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus pada Yayasan Masjid Baiturahman Pakusari - Jember)”

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui akuntabilitas dalam mengelola keuangan masjid. Salah satu permasalahannya adalah ketidaksesuaian penyajian dalam laporan keuangan Masjid Baiturrahman adalah belum dilaporkannya pendapatan dari “kotak amal Baiturrahman” yang dibawa keliling oleh lansia dan anak-anak untuk meminta sumbangan di perumahan sekitar masjid. Pendapatan yang diungkapkan sebagian besar hanya pendapatan dari infak Sholat Jumat sehingga membuat masyarakat menjadi lebih penasaran akan pengelolaan keuangan Masjid Baiturrahman tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis permasalahan tersebut.

10. Puji Wibowo, Akhmad Khizazi, Azas Maburur. (2019). Journal of Dedicators Community. Edisi Khusus Hasil Sembadha dengan judul “Membumikan Laporan Keuangan untuk Penghafal Al-Quran”.

Penelitian ini bertujuan untuk membenahi kemampuan pengelolaan keuangan bagi pengurus organisasi non profit agar lebih komprehensif, akuntabel, dan memberikan informasi utuh

bagi pengambil keputusan. Masalah utama pada penelitian adalah penyiapan laporan keuangan seperti kapasitas sumberdaya manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana keuangan, sebagian dari pegawainya tidak pernah menempuh pelatihan atau Pendidikan khusus akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode andragogi yang berfokus pada masalah dengan memberikan pelatihan menyusun laporan keuangan yang baik.

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka (Persamaan dan Perbedaan)

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Natalia Paranoan dan Chalarge Totanan (2018), JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2 Hal 161-172, ISSN 2303-1018 yang berjudul “Akuntabilitas Berbasis Karma”.	- Meneliti Akuntabilitas - Objek Organisasi Non Profit	- Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian
2	Asbi Amin (2019), ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika <i>Siri’na Pacce</i> : Persepsi Mahasiswa Akuntansi”.	- Meneliti implementasi <i>siri’ na pacce</i>	- Objek Penelitian
3	Sri Rahayu, dkk (2018), IRAJ: International Journal of Management and Applied Sciences Volume-4, Issue-7 with the title “ <i>Siri’ na pacce</i> culture of Bugis-Makassar in the Context of Modern Life (Overview Historically and Theory Jean Baudrillard Simulation”.	- Meneliti <i>siri’ na pacce</i>	- Objek Penelitian - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian (berfokus ke modern life)
4	Ultsani, Fadillah, dkk. (2019). Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. Vol. 9, No. 2 dengan judul “Menggali Nilai <i>Siri’ Na Pacce</i> Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi”.	- Meneliti <i>siri’ na pacce</i>	- Objek Penelitian - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian
5	Fuady, Muhammad Ikram. (2019). FIAT JUSTISIA Faculty of Law, Lampung University. Vol. 13 No. 3 with the <i>title Siri’ Na Pacce</i> Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province).	- Meneliti <i>siri’ na pacce</i>	- Objek Penelitian - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian
6	Marlia Asamarani dan Rohmawati Kusumaningtias. (2019). AKUNESA: Jurnal akuntansi Unesa, Vol. 8, No. 1 dengan judul “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Prespektif <i>Maqashid Syariah</i> : Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya”	- Objek penelitian - Meneliti akuntabilitas	- Lokasi Penelitian - Fokus penelitian

7	Pitoyo, Djoko. (2008). Jurnal Filsafat: Universitas Gadjad Mada Vol. 18, No. 2 dengan judul “Tuna Satak Bathi Sanak (Kearifan Jawa dalam Etika Bisnis)”	- Meneliti implementasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari	- Objek Penelitian - Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian
8	Athifah, Ai Nur Bayinah, Efri Syamsul Bahri. (2018). PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara”	- Objek Penelitian - Meneliti Akuntabilitas dan Transparansi	- Metode penelitian - Fokus penelitian
9	Ibna Kamilia dan Pujiarti. (2017). JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 1 dengan judul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus pada Yayasan Masjid Baiturahman Pakusari - Jember)”	- Objek Penelitian - Meneliti akuntabilitas non profit	- Lokasi Penelitian - Fokus Penelitian
10	Puji Wibowo, Akhmad Khizazi, Azas Mabur. (2019). Journal of Dedicators Community. Edisi Khusus Hasil Sembadha dengan judul “Membumikan Laporan Keuangan untuk Penghafal Al-Quran”	- Meneliti Akuntabilitas - Objek Penelitian (Non Profit)	- Lokasi Penelitian - Metode Penelitian

## **B. Landasan Teori**

### **1. Akuntabilitas**

Secara filosofi, dapat kita katakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah amanah, yang berarti dapat dipercaya. Hal ini sangat penting bagi setiap manusia khususnya pemimpin karena apabila tidak memiliki nilai tersebut maka akan muncul kerusakan (Kholmi, 2012). Akuntabilitas sebagai hubungan antara dua pihak yaitu eksekutor dan pengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (2002:12) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja-kinerja yang dilakukan dalam waktu tertentu kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban.

Nico Andrianto (2010) menyatakan bahwa Akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip seperti adanya komitmen antara pemimpin dan staffnya, terdapat system yang menjamin kegunaan dari sumberdaya secara konsisten dan adanya peraturan yang berlaku, serta adanya acuan tingkat pencapaian yang akan diraih, berorientasi kepada visi dan misi sehingga mendapatkan hasil yang dicita-citakan, bersikap objektif, jujur, dan inovatif.

Tentu begitu banyak teori mengenai akuntabilitas yang berfungsi untuk bagaimana mengetahui kesehatan dari sebuah lembaga. Secara historis akuntabilitas lahir dari kata akuntansi yang

memiliki arti pembukuan. Di dalam prespektif politik, akuntabilitas tidak lagi menjadi pengertian yang kaku seperti kumpulan kertas yang disusun dalam buku atau administrasi keuangan, akan tetapi membawa nilai-nilai keadilan dan kesesuaian. Arti lain dari akuntabilitas menurut Dubnick (1998) mengatakan bahwa akuntabilitas seperti melaporkan dan memberikan laporan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar ketika kita berbicara mengenai akuntabilitas maka yang menjadi *pressure point* adalah informasi dan saksi.

Dalam dimensi yang dijelaskan Koppel (2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi seperti transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Pada kelima komponen yang menyusun dimensi akuntabilitas tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka tidak *mutually exclusive* yang berarti mereka saling berinteraksi dan saling memengaruhi, contohnya bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana berefek pada kontrol dan responsibilitas. Meskipun memiliki kelima dimensi tersebut, transparansi dan liabilitaslah yang dipandang menjadi hal yang fundamental dari konsep akuntabilitas.

Dapat dikatakan bahwa nilai utama dari akuntabilitas adalah transparansi, yang berarti bagaimana individu atau organisasi dapat menjelaskan dan menilai tindakannya sehingga individu ataupun organisasi tidak dapat menghindar dan menyembunyikan dari sebuah tindakan *tabayyun* (pengecekan). Transparansi merupakan alat yang

sangat penting untuk melihat kinerja dan menjadi kunci utama dalam membuka dimensi lainnya. Apabila sebuah individu atau organisasi transparan maka mereka telah memberikan jaminan akses kepada publik yang memiliki kepentingan.

Liabilitas merupakan salah satu dimensi dari akuntabilitas yang menekankan pada tindakan individu atau organisasi dalam memberikan *punishment* apabila melakukan kesalahan/pelanggaran dan *reward* apabila memberikan sebuah kesuksesan pada organisasi. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari pertanggungjawaban atas penyelewengan dana, ketidaktepatan, atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas serta penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, terdapat sistem remunerasi yang diberikan kepada individu atau organisasi berdasarkan usaha/kinerja, contohnya pegawai menerima bonus dan kompensasi apabila mencapai target kerjanya.

Adanya pelanggaran tanpa dilakukannya liabilitas salah satu ciri sebuah organisasi yang memiliki akuntabilitas yang lemah. Sebuah konsekuensi harus menjadi patokan dan melekat dengan kinerja yang berbentuk *reward* dan *punishment*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa liabilitas memiliki korelasi dalam akuntabilitas, yang perlu ditanyakan adalah apakah organisasi atau individu dapat menerima konsekuensi dari manifestasi tindakan mereka dalam bekerja?

Apabila dua komponen yaitu transparansi dan liabilitas telah terbangun maka dimensi yang akan muncul adalah kontrol yang



berfokus pada pola-pola hubungan yang saling berhubungan antara *principal* dan *agent* contohnya perilaku A di sebuah organisasi dapat menyebabkan perilaku B, maka dapat dikatakan bahwa A mengontrol B sehingga A akuntabel terhadap B. Berdasarkan konsep tersebut kontrol kepada Lembaga Filantropi sebagai elemen dari akuntabilitas.

## 2. Teori Orientasi Nilai Budaya

Ketika berbicara mengenai teori orientasi nilai budaya, maka kita akan membahas mengenai konsep nilai. Parsons dan Shills dalam jurnal Antropologi Indonesia menjelaskan bahwa sebuah nilai memiliki konsepsi, eksplisit ataupun implisit, khas yang dimiliki sekelompok orang ataupun individu, berkaitan dengan apa yang seharusnya mereka inginkan sehingga memengaruhi pilihan yang tersedia seperti dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari tindakan. Dari pengertian diatas, perlu kita perhatikan bahwa kalimat kuncinya atau penekanan poinnya adalah bahwa *value* atau nilai dalam Bahasa Indonesia merupakan sebuah konsep tentang hal yang seharusnya diinginkan, perlu kita ketahui bahwa ‘hal yang seharusnya diinginkan adalah berbeda dengan ‘hal yang diinginkan’. Kedua poin tersebut tidak boleh dikelirukan karena sebagai konsepsi bahwa nilai berbentuk abstrak, sesuatu yang dibangun dan berada dalam pikiran atau budi yang tidak dapat disentuh atau diraba secara langsung menggunakan pancaindera, karena nilai hanya dapat dirasakan ketika

nilai tersebut disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan, dan materi yang telah dibuat oleh manusia

Manifestasi dari nilai adalah ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Untuk mendapatkan nilai yang dikandung dalam sebuah ucapan atau perbuatan, seseorang harus melakukan penafsiran dan mengambil kesimpulan atau inferensi, contohnya perkataan ‘orang harus menghormati orang tua’ bukan sebuah nilai, tapi manifestasinya dari suatu nilai yang dijelaskan/diungkapkan dalam kata-kata. Contoh lainnya yaitu ‘membungkuk ketika berjalan di depan orang tua’ bukan sebuah nilai tetapi manifestasi dari sebuah nilai yang diwujudkan dengan bentuk tingkah laku. ‘sebuah benda prasejarah yang indah bertuah’ bukanlah sebuah nilai kultural akan tetapi manifestasi dari sebuah nilai yang diwujudkan dalam bentuk materi yang dapat dirasakan oleh pancaindera. Tugas dari peneliti adalah mencari tahu atau menggali nilai-nilai yang dianut oleh kelompok/komunitas melalui ucapan, perilaku, dan perilaku anggota masyarakat. Jadi, untuk mengetahui dan menangkap nilai yang ada didalamnya seorang peneliti tidak cukup hanya mengamati, mencatat ucapan, tingkah laku, atau materi dari anggota kelompok/komunitas, tapi peneliti harus pandai dalam menggali dan menemukan konsepsi yang tersembunyi

di bawah permukaan ucapan-ucapan, tingkah laku/perbuatan dari materi tersebut.

### 3. *Siri' na Pacce*

Dalam budaya Sulawesi Selatan, terdapat istilah atau motto yang mencerminkan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yaitu *siri na pacce*. Pengertian dari kata *siri'* merupakan rasa malu atau harga diri seseorang, sedangkan pengertian dari *pacce* atau Bahasa lainnya seperti bugis dan duri adalah *passé/pesse* yang berarti pedih/pedas (teguh pendirian/komitmen). *Pacce* dapat dikatakan suatu kecerdasan emosional sebagai sikap simpati dan empati dalam merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam sebuah kelompok/organisasi. Arti dari kata *siri'* dalam Bahasa bugis, makassar, *duri* adalah tidak tega, kasihan atau iba. *Siri' memiliki*

Tabel 1: Kerangka Orientasi Nilai Budaya

MASALAH HIDUP		ORIENTASI NILAI BUDAYA	
Hakekat dan sifat hidup	hidup adalah buruk	hidup adalah baik	hidup adalah buruk tapi harus diperbaiki
Hakekat kerja	kerja adalah untuk hidup	kerja adalah untuk mencari kedudukan	kerja adalah untuk menambah mutu karya
Hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu	masa lalu	masa kini	masa depan
Hakekat hubungan manusia dengan alam	tunduk pada alam	mencari keselarasan hidup dengan alam	menguasai alam
Hakekat hubungan manusia dengan manusia	memandang pada tokoh-tokoh atasan	mementingkan rasa ketergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	mementingkan rasa tidak tergantung pada sesamanya (berjiwa individualistik)

*empat kategori seperti siri' ripakasiri', siri' ri mappakasiri', siri tappela' siri', dan siri' mate siri'*

Budaya siri na pace merupakan salah satu falsafah yang dianut oleh masyarakat Sulawesi selatan khususnya suku bugis, makassar, duri, dll. Istilah tersebut sebagai nilai yang abstrak sebagai pedoman bagaimana masyarakat tersebut bertingkah laku. Salah satu falsafah dari masyarakat Bugis-Makassar adalah budaya siri' na pace yang masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Siri' na pace dalam istilah masih sulit untuk didefinisikan karena siri' na pace hanya dapat dirasakan oleh pengikutnya. Siri', bagi masyarakat bugis-makassar mengajarkan tentang moralitas keasusilaan berupa anjuran atau himbauan, larangan, hak dan kewajiban sebagai tindakan manusia agar dapat menjaga dan mempertahankan diri serta kehormatannya.

*Siri'* merupakan rasa malu yang tersusun dalam dimensi harkat dan martabat manusia yang menjadi sesuatu hal yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam bermuamalah/berinteraksi dengan orang lain sedangkan *pacce* merupakan sebuah nilai yang mengajarkan kepekaan sosial dan solidaritas tanpa mementingkan diri sendiri dan kelompok/komunitas. Nilai budaya ini hingga saat ini masih mampu bertahan di era modern dan disegani, makna lain dari *pacce* merupakan sifat empati dan simpati dalam menanggung beban penderitaan orang, kalua dalam istilah Bahasa Indonesia “Ringan sama dijinjing berat sama dipikul” (Elmachete, 2014).

Secara turun menurun, konsep nilai *siri' na pacce* akan selalu menjadi pedoman dan pegangan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Dalam nilai tersebut, memiliki falsafah mengenai nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi seperti bagaimana seseorang hidup dengan tetap memiliki kepekaan dan memerhatikan kepentingan orang lain dan nilai ini memiliki falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. (Azis dkk : 2015). Setelah kita mengetahui bahwa *siri' na pacce* merupakan pegangan hidup dan pedoman masyarakat Bugis-Makassar maka hal ini dapat menjadi peluang yang baik dalam pengelolaan pelaksanaan akuntabilitas berbagai aspek khususnya pengelolaan filantropi Islam, yang mana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban sebuah lembaga/organisasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan program sosial, karena dana yang digunakan adalah dana sosial masyarakat. *Siri' na pacce*, memiliki turunan nilai seperti *ada' togeng dan lempu'* yang berarti berkata jujur, maka sebuah lembaga/organisasi sosial yang melaksanakan tanggungjawabnya diharapkan dapat berkata yang sebenarnya dan jujur.

Ketika nilai tersebut tidak diterapkan akan terjadi ketimpangan dan pengikisan terhadap budaya tersebut. Berangkat dari kekhawatiran banyak pihak salah satunya penulis akan terjadinya pendangkalan budaya, maka penulis menganggap bahwa nilai falsafah ini harus tetap menjadi pedoman, pegangan, dan ciri khas masyarakat

Bugis-Makassar. Nilai siri' dapat dikatakan sebuah prespektif konsep kultural yang berimplikasi pada tingkah laku/adab yang nyata. Tingkah laku tersebut dapat dilihat dan diamati sebagai pernyataan atau wujud dari kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Istilah *siri'* diartikan sebagai pernyataan sikap yang tidak rakus dan merupakan sebuah prinsip dan semboyan masyarakat Bugis-Makassar, seperti ungkapan-ungkapan; *siri' na ranreng* (siri' dipertaruhkan demi kehormatan), *palaloi siri'nu* (tegakkan siri'mu), *tau de' siri'na* (orang tak memiliki malu, tak memiliki harga diri). Ungkapan tersebut dimanifestasikan melalui kata-kata seperti taro ada' taro gau (satu kata satu perbuatan) yang memiliki arti janji, komitmen, cita-cita, atau tekad yang apabila telah dikatakan haruslah dipenuhi dan dibuktikan dalam perbuatan yang nyata. Hal ini, menjadi sejalan dengan salah satu prinsip yaitu; *abbatireng ripolipukku* (asal usul leluhur senantiasa dijunjung tinggi, semuanya kuabadikan demi keagungan leluhurku). Berdasarkan jenisnya siri' terbagi yaitu :

- a) *Siri' nipakkasiri'*: *siri'* yang kaitannya dengan harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* ini merupakan hal yang tabu apabila dilanggar bahkan taruhannya adalah nyata
- b) *Siri' mappakasiri'siri'*: Dalam Bahasa Makassar *siri' tappela'* *siri'* atau dalam Bahasa Bugis *siri' teddeng siri'* yang memiliki arti bahwa rasa malu seseorang yang telah hilang atau terusik

karena sesuatu hal, *siri'* ini berkaitan dengan etos kerja yang tinggi.

- c) *Siri' masiri'*: memiliki arti sebagai *point of view* dalam berkehidupan bagaimana mempertahankan, meningkatkan, mencapai sebuah prestasi yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh, usaha yang besar, dan sekuat tenaga dengan mengarahkan segala kekuatannya demi *siri'*.
- d) *Siri' mate siri'*: *siri'* ini berkaitan dengan keimanan seseorang, dalam pandangan orang Bugis-Makassar, *siri'* ini terjadi apabila orang yang didalam dirinya sudah tidak memiliki rasa malu (iman) sedikitpun. Tipe orang seperti ini susah untuk melakukan perubahan karena sudah tidak merasa malu, dapat dikatakan sebagai bangkai atau sampah masyarakat.

#### 4. Filantropi Islam

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *phio* dan *anthropos* yang mana memiliki arti yang sama yaitu “cinta manusia”. Baik individu maupun kelompok apabila memiliki rasa peduli kepada orang lain dapat dikatakan sebagai filantropi. Tindakan yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang rela mengorbankan dirinya atau hartanya dapat disebut dengan filantropi (Latief, 2017). Filantropi dapat dikatakan sebagai konsep umum dari berderma. Konsep kedermawanan individu (*private charity*) berbeda dengan kesejahteraan public (*social welfare*) dari segi konseptual titik penekanan.

Konsep kedermawanan berkembang sangat dinamis, tergantung dari kondisi yang memengaruhinya seperti kondisi sosial, politik, atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat barat, berbeda dengan tradisi masyarakat Cina, filantropi dapat dikatakan sebagai sikap baik dari setiap individu maupun kelompok yang didasari rasa simpati ataupun rasa kasihan (*compassionate good work*) sedangkan tradisi masyarakat Arab pra-Islam mengartikan filantropi sebagai sikap ramah tamah (*hospitality*). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap saling menghormati dan memuliakan anggota komunitas atau antar komunitas.

Menurut W.K.Kellog Foundation dalam suara Muhammadiyah (Latief, 2017) bahwa memberikan waktu, materi berupa uang dan pengetahuan bagaimana caranya mengembangkan kebaikan Bersama, atau arti lainnya filantropi bukan hanya aspek material, akan tetapi secara luas tidak terbatas. Pengertian lainnya seperti istilah *to give* (memberi) atau *to share* (berbagi) dapat diartikan sebuah bentuk dalam diri untuk bersimpati, berpartisipasi, memberikan dukungan, mendedikasikan diri ataupun berkomitmen serta terlibat dalam *society* dalam menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masalah seperti kemiskinan ataupun masalah sosial lainnya .

Dewasa ini, Lembaga filantropi sangat berkembang pesat dengan konsep yang bermacam-macam seperti filantropi yang bernuansa keagamaan, sosial, moral, ataupun politik yang memiliki kesamaan yaitu melayani, menyantuni, mengayomi, dan *problem solver*, sebagiannya lagi



memiliki kecenderungan untuk membidik kebijakan-kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kaum marjinal.

## 5. Kerangka Pikiran

Kusmiati (2015) menyatakan bahwa Institusi yang baik dan sehat apabila pengelolaannya transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memiliki standar baku serta memiliki target dan sasaran yang ingin dicapai. Sehingga dapat dikatakan untuk mewujudkan Lembaga yang baik diperlukan manajemen yang baik sehingga terciptanya laporan keuangan dan kegiatan yang transparan, akuntabel, dan relevan sehingga mendapatkan kepercayaan terhadap penyalur dana. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK No. 109, hal ini senada dengan ikhtiar kebijakan akuntansi YBM PLN (Laporan Keuangan YBM PLN Hal. 9).

Dalam penerapan akuntabilitas di Rumah Qur'an, sangat penting untuk menekankan nilai-nilai transparansi, akuntabel. Dalam penerapan akuntabilitas ini perlunya nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung terciptanya akuntabilitas sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol dan pedoman dalam bertindak khususnya pengelolaan dana. Penelitian ini akan mengangkat nilai-nilai budaya luhur *siri' na pacce* dalam menunjang pengelolaan dana filantropi seperti *ada' tonging* (berkata yang jujur), *lempu'* (jujur), *getting* (tegas dan konsisten), *Sipakatau'* (saling menghormati), dan *mappesona ri dewata seuwae* (pasrah kepada Tuhan *Pacce* atau *pesse* dapat dikatakan sebagai tatanan nilai yang lahir dan

dianut masyarakat Bugis-Makassar yang dimotivasi oleh nilai budaya *siri'* (malu).. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang baik bagi Lembaga filantropi Islam, *siri'* dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hal ini senada dengan Surah Al-Hajj/22:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
وَاللَّهِ عِيبَةُ الْأُمُورِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Pikir**

